

**BUKU INFORMASI PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA  
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI**



**DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
2021**

# BUKU JASA KONSTRUKSI

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Profil Ekonomi Sektor Jasa Indonesia.....	4
1.3 Profil Perdagangan Sektor Jasa Konstruksi Indonesia .....	5
<b>BAB II SEKTOR JASA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024.....</b>	<b>14</b>
2.1 Sektor Jasa dalam RPJMN.....	14
2.2 Sektor Jasa Konstruksi dalam RPJMN .....	15
<b>BAB III KOMITMEN UNILATERAL DAN KOMITMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL SERTA OFFER SEKTOR JASA KONSTRUKSI .....</b>	<b>17</b>
3.1 Peraturan Domestik Mengenai Jasa Konstruksi .....	17
3.1.1 UU Perdagangan dan UU terkait.....	17
3.1.2 Peraturan Sektoral Jasa Konstruksi .....	17
3.2 Komitmen dan Offer Sektor Jasa Konstruksi di berbagai fora .....	18
3.2.1 Multilateral .....	20
3.2.2 Regional .....	28
3.2.3 Bilateral .....	49
<b>BAB IV POTENSI PERUNDINGAN DI SEKTOR JASA KONSTRUKSI .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V ISU PERUNDINGAN DI SEKTOR JASA KONSTRUKSI .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jasa konstruksi merupakan sektor jasa yang memainkan peran penting pada hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, sektor ini juga memiliki fungsi ekonomi yang strategis karena menyediakan infrastruktur guna menunjang kinerja sektor lain (Veerasanai & Alias, 2020). Sektor ini menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk proses ekstraksi produk primer, produksi, transportasi, distribusi, dan konsumsi pada barang dan jasa. Sektor ini tidak hanya menyediakan gedung-gedung yang menampung berbagai macam aktivitas manusia, tetapi juga sebagai pemasok infrastruktur fisik yang penting dalam menjamin kelancaran beragam kegiatan ekonomi, seperti pertambangan, minyak bumi dan petrokimia, pembangkit listrik termasuk energi terbarukan, manufaktur, sistem distribusi air dan utilitas, saluran pembuangan/limbah, transportasi, telekomunikasi, dan kesehatan masyarakat.

Sektor jasa konstruksi juga dianggap sebagai sektor jasa strategis mengingat hubungannya yang erat dengan pekerjaan umum serta implementasi kebijakan fiskal. Seperti yang kita ketahui, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan pembangunan non-perumahan merupakan kekuatan pendorong yang penting bagi kegiatan konstruksi di banyak negara (Butkeviciene, 2005). Disamping itu, melalui komponen investasi, terdapat keterkaitan yang kuat antara sektor konstruksi dan pembangunan ekonomi. Output dari sektor konstruksi merupakan respons terhadap permintaan investasi baru, dengan demikian dapat dikatakan sektor konstruksi merupakan penentu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara (Bon & Crosthwaite, 2000). Melalui komponen investasi pula jasa konstruksi memainkan peran penting dalam alih teknologi, penyediaan lapangan pekerjaan, pendapatan devisa, dan mencapai tujuan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat suatu negara (Mukherjee, 2001). Bagi Indonesia peran jasa konstruksi menjadi lebih vital bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan upaya untuk menjadi negara maju. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa konstruksi menyediakan infrastruktur fisik, yang tentu saja merupakan dasar dari semua kegiatan ekonomi.

Jasa konstruksi merupakan sektor yang relatif padat karya (baik terampil maupun tidak terampil), sehingga potensi mekanisasi dan otomatisasi tetap terbatas (Grosso, Jankowska, & Gonzales, 2008). Namun demikian sektor jasa konstruksi merupakan sektor yang dinamis dengan memanfaatkan inovasi seperti pemanfaatan drone untuk pengamatan survei proyek pembangunan menggantikan survei dari permukaan tanah, dan pemanfaatan 3D *printing* untuk mengkompensasi terbatasnya tenaga kerja terampil. Selain itu, terdapat pre-fabrikasi konstruksi (*prefabricated construction*) yang dilakukan di pabrik sehingga kontraktor hanya melakukan pekerjaan perakitan dilokasi, yang mana memberikan manfaat penurunan waktu pengerjaan proyek infrastruktur (World Trade Organization, 2019).

Tidak seperti sektor manufaktur, sifat jasa konstruksi ditandai dengan imobilitas dan keunikan outputnya (Job, Hans, & Geert-Jan, 2002). Dalam bisnis ini, perusahaan menyediakan jasa yang disesuaikan dengan permintaan klien bukan produksi massal yang siap diekspor. Karakteristik jasa konstruksi yang membutuhkan produksi lokal sejalan dengan intensitas tenaga kerja dan material tinggi, menjadi faktor yang menjelaskan mengapa industri jasa konstruksi di beberapa negara tetap berorientasi pada pasar domestik daripada orientasi ekspor (Grosso, Jankowska, & Gonzales, 2008).

Kendatipun demikian, saat ini jasa konstruksi telah diperdagangkan melewati batas nasional, 90% diantaranya dilakukan melalui *commercial presence* (World Trade Organization, 2019). hal ini dikarenakan industri jasa konstruksi berbeda dari banyak industri jasa lainnya karena outputnya bersifat fisik, dan dalam perdagangan jasa konstruksi lintas batas hasil akhir terletak di negara tujuan ekspor. meskipun terdapat beberapa pengecualian, seperti untuk platform minyak lepas pantai dan beberapa jenis pembangkit *thermal*. Oleh karena itu, pada tahap akhir pekerjaan konstruksi, beberapa bentuk *commercial presence* umumnya diperlukan (Grosso, Jankowska, & Gonzales, 2008; Chen, 2008). Kehadiran ini dapat bervariasi mulai dari mengirim kru hanya untuk jangka waktu proyek tertentu (yang bisa beberapa minggu atau bulan) hingga kehadiran komersial yang kurang lebih permanen dimana perusahaan jasa asing merekrut staf secara lokal (Chen, 2008). Akan tetapi, ketika negara tujuan memberlakukan pembatasan yang tinggi bagi penyedia jasa konstruksi asing, maka pengusaha jasa konstruksi lebih memilih untuk melakukan investasi jangka pendek, daripada mendirikan perusahaan permanen di negara tujuan ekspor jasa konstruksi (Grosso, Jankowska, & Gonzales, 2008).

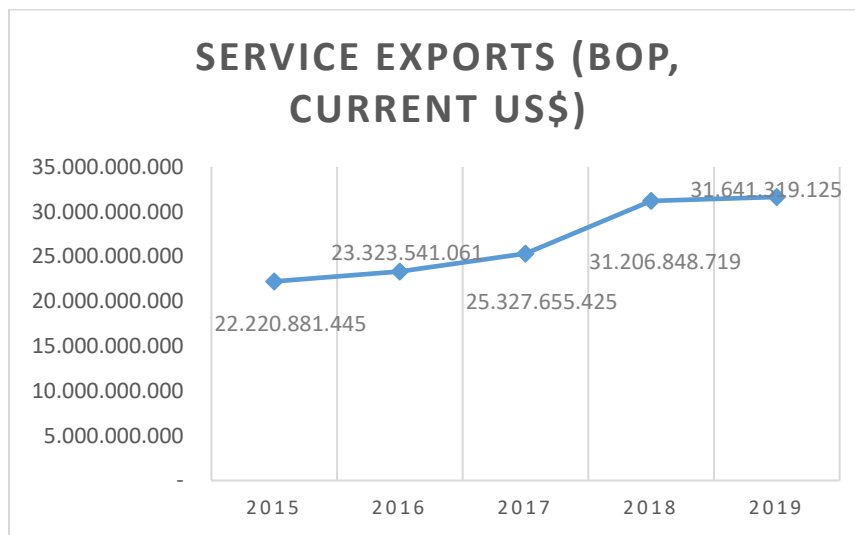
Seiring dengan liberalisasi perdagangan jasa internasional, perusahaan konstruksi diharapkan mengeksport jasa mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ling & Kwok, 2007). Dalam hal ini, ukuran perusahaan merupakan aspek penting dalam jasa konstruksi karena berkaitan erat dengan kemampuan sumber dayanya. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan lebih banyak proyek internasional karena mereka memiliki jumlah karyawan yang lebih besar dan dengan demikian akan memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik daripada perusahaan yang lebih kecil (Cuervo & Low, 2003). Ukuran perusahaan juga berkorelasi dengan kekuatan keuangan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspor jasa konstruksi ke luar negeri, maka dukungan keuangan yang tangguh menjadi penting untuk menyelesaikan proyek konstruksi (Cuervo & Low, 2003). Selain itu, reputasi perusahaan di negara asalnya juga menjadi penting untuk dapat menanamkan kepercayaan pada klien dan bersaing di pasar luar negeri berdasarkan kualitas produk jasa dan bukan hanya pada aspek harga semata (Jennings & Holt, 1998). Secara umum dapat dikatakan bahwa perusahaan konstruksi yang ingin mengeksport jasanya harus memiliki kualitas produk yang baik, kualitas layanan yang baik, staf profesional dengan kemampuan teknis yang berkualitas tinggi. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sumber daya keuangan, kemampuan teknologi dan kemampuan dalam manajemen serta perencanaan strategis (Ling, 2005).

Berdasarkan latar belakang tersebut, buku jasa konstruksi ini terbagi ke dalam lima bagian utama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dan profil perdagangan sektor jasa konstruksi Indonesia, kemudian di bagian kedua akan diulas mengenai sektor jasa khususnya jasa konstruksi di dalam RPJMN 2019-2024, dan dibagikan ke ketiga buku ini akan mengulas mengenai komitmen Indonesia di sektor jasa konstruksi pada berbagai fora perjanjian liberalisasi perdagangan jasa. Pada bagian keempat buku ini menjelaskan mengenai potensi yang terdapat di dalam perundingan perdagangan jasa di sektor konstruksi dan pada bagian kelima, buku ini berupaya memberikan gambaran isu perundingan perdagangan jasa di sektor konstruksi yang dihadapi oleh Indonesia.

## 1.2 Profil Ekonomi Sektor Jasa Indonesia

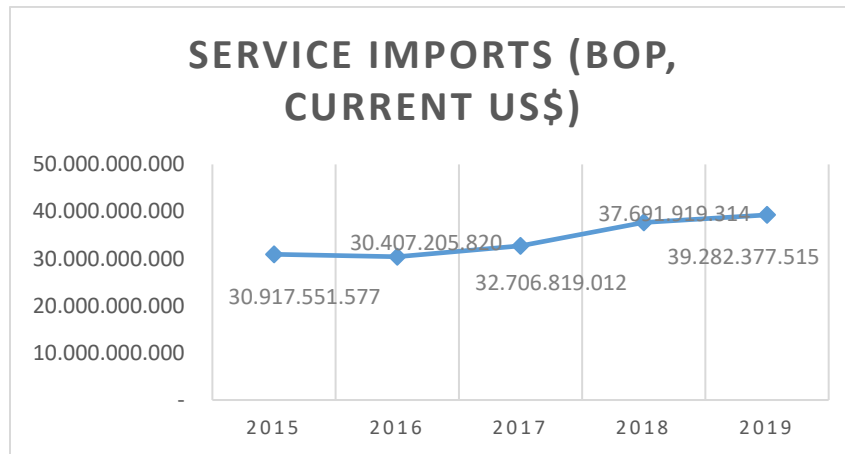
Sektor jasa telah membantu perekonomian Indonesia selama masa pemulihan ekonomi pasca krisis keuangan Asia. Saat ini, sektor jasa memiliki peran yang lebih besar daripada sektor pertanian dan manufaktur, baik dari peran penyediaan lapangan kerja maupun *output*-nya. Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor jasa terhadap PDB meningkat dari 44 persen menjadi lebih dari 50 persen, sementara penyerapan tenaga kerja meningkat dengan besaran serupa, yaitu hampir 50 persen. Sektor jasa yang berperan penting untuk *recovery* ekonomi Indonesia dari krisis keuangan Asia yaitu jasa telekomunikasi, komputer dan konstruksi begitu pula dengan jasa transportasi, distribusi, dan logistik (Manning & Aswicahyono, n.d). Pembangunan sektor jasa yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung salah satu visi dan misi RPJMN 2020-2024, yakni mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Dari sisi ekspor, ekspor jasa Indonesia terus mengalami peningkatan dari 22,22 miliar US\$ pada tahun 2015 menjadi 31,64 miliar US\$ pada tahun 2019. Sungguhpun demikian, impor jasa Indonesia juga terus mengalami peningkatan pada periode yang sama, yaitu dari 30,91 miliar US\$ menjadi 39,28 miliar US\$ pada tahun 2019.



Nilai Ekspor Jasa Indonesia tahun 2015-2019 (wits.worldbank.org, 2021)

s



Nilai Impor Jasa Indonesia tahun 2015-2019 (wits.worldbank.org, 2021)

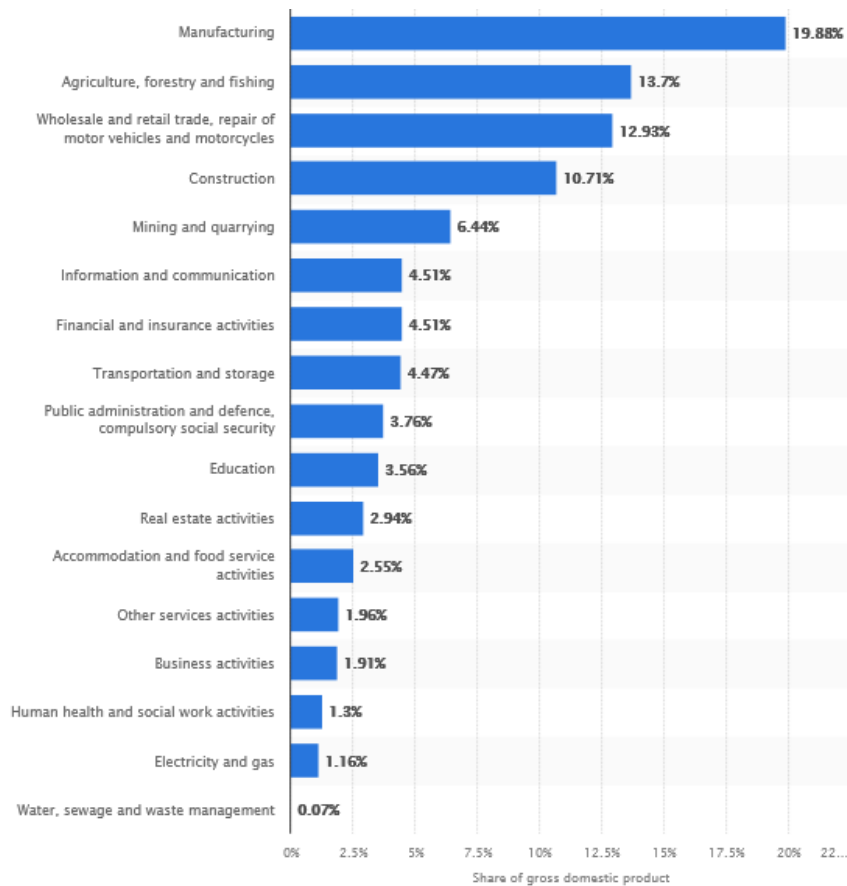
### 1.3 Profil Perdagangan Sektor Jasa Konstruksi Indonesia

Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diubah melalui UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha perkerjaan konstruksi terintegrasi. Badan usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikasi untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (konsultan) sebagai perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (Kementerian PUPR, 2020).

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, industri konstruksi berkontribusi sebesar 0,61 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Industri konstruksi merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga setelah usaha industri pengolahan sebesar 0,91 persen dan diikuti perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,66 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan struktur PDB Indonesia tahun 2018 yang didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,86 persen; diikuti oleh perdagangan besareceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,02 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,81 persen; dan konstruksi sebesar 10,53 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,22 persen pada tahun 2018 (BPS, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018, 2018).

Pada tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,80 persen; perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,61 persen; dan konstruksi sebesar 0,58 persen. Persentase tersebut juga selaras dengan kontribusi sektor tersebut terhadap PDB nasional, dimana jasa konstruksi berada pada posisi keempat dengan kontribusi sebesar 10,75 persen. Sedangkan kontribusi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,70 persen; perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,01 persen; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,72 persen terhadap PDB. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,18 persen (BPS, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019, 2019).

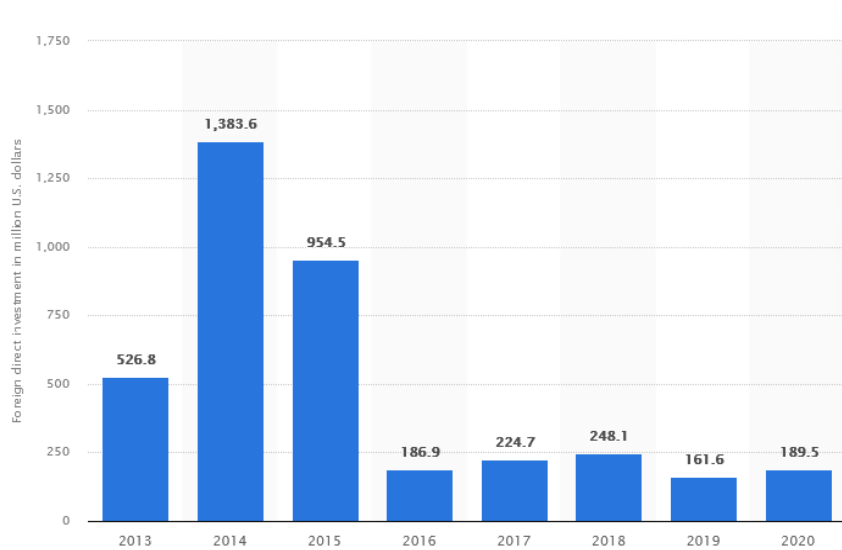
Pada tahun 2020, sektor konstruksi berkontribusi 10,71 persen terhadap PDB Indonesia. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04 persen, angka ini tetap menempatkan sektor jasa konstruksi berada pada posisi keempat dengan kontribusi sebesar 10,71 persen pada PDB nasional setelah sektor lapangan usaha industri pengolahan (19,88 persen); pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,70 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,93 persen), serta Pertambangan dan Penggalian (6,44 persen). Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66 persen (BPS, 2020b). seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.



Kontribusi industri pada produk domestik bruto Indonesia tahun 2020 (Statista Research Department, 2021)

Dari sisi investasi, FDI di sektor konstruksi Indonesia mengalami fluktuasi dimana investasi terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 1.383 juta US\$. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 954 juta US\$ dan relatif stabil di kisaran 161 juta US\$ s.d 248 juta US\$ di antara tahun 2016 sampai tahun 2020.





Nilai *foreign direct investment* (FDI) dalam sektor konstruksi di Indonesia dari 2013 hingga 2020 (dalam juta U.S. dollar) (Statista Research Department, 2021)

Tren investasi di sektor konstruksi tersebut juga sejalan dengan nilai ekspor konstruksi Indonesia, di mana pada tahun 2014 ekspor konstruksi Indonesia mencapai 711 juta US\$ dan mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 378 juta US\$. Kenaikan ekspor jasa konstruksi Indonesia kembali terjadi pada tahun 2019 menjadi 481 juta US\$ dan menurun kembali di tahun 2020 senilai 364 juta US\$ karena terjadinya pandemi Covid-19. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai eksportir konstruksi ketiga terbesar di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia. Indonesia juga berada pada posisi ketiga terbesar yang melakukan jasa konstruksi di ASEAN setelah Malaysia dan Thailand di tahun 2020 dengan nilai impor konstruksi sebesar 407 juta US\$. Nilai impor tersebut turun dari tahun 2019 yang mencapai 496 juta US\$.

Exporters	Exported value in 2011	Exported value in 2012	Exported value in 2013	Exported value in 2014	Exported value in 2015	Exported value in 2016	Exported value in 2017	Exported value in 2018	Exported value in 2019	Exported value in 2020
ASEAN	3737659	4166066	4589731	3639893	3043066	2934971	2841959	3136344	3116930	2717644
Singapore	1543200	1538238	1706705	1163648	852618	986720	768036	1159365	1277051	809209
Malaysia	1101510	1176690	1024940	855290	1023411	1001528	950916	862570	640768	771905
Indonesia	551255	862731	848460	711728	378704	225690	368997	404761	481093	364140
Myanmar	14978			131691	82614	63587	207592	147741	135728	327332
Thailand	441830	440500	817180	612830	533030	462708	358086	286530	243237	178460
Brunei Darussalam								48764	94135	135627
Philippines	46485	99800	88548	60622	59591	71285	57326	60954	65821	85361
Cambodia	8390	16557	15337	10237	10074	13076	16569	13934	35412	45610
Viet Nam	18000	20000	80000	90000	98000	106000	110000	115000	128774	
Lao People's Democratic Republic	12011	11550	8561	3847	5024	4377	4437	36725	14911	

Nilai ekspor jasa konstruksi negara ASEAN (dalam ribu U.S. dollar  
(<http://i-tip.wto.org/services/ChartResults.aspx> & [timeseries.wto.org/](http://timeseries.wto.org/))

Importers	Imported value in 2011	Imported value in 2012	Imported value in 2013	Imported value in 2014	Imported value in 2015	Imported value in 2016	Imported value in 2017	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020
ASEAN	3255279	4380663	6065212	5822064	5757201	5224914	6198131	5644896	4528957	2908481
Malaysia	1347350	2397970	2560910	2638599	2705797	2941314	3919145	2907702	1347342	906287
Thailand	307230	224070	709230	762590	849978	517666	278977	265584	415016	903852
Indonesia	497428	631819	853153	660001	452505	132954	186310	143253	496637	407623
Singapore	525849	519174	543275	392723	339607	372119	376487	550398	471573	297085
Cambodia	140686	156493	134197	124640	118840	137820	156290	167710	165745	132371
Philippines	50650	41939	77203	70009	42363	59824	63360	73377	70751	96535
Brunei Darussalam					125025	26355	26900	117309	241969	86771
Myanmar				92483	38736	23595	113391	252033	126136	77957
Viet Nam	363000	380000	1150000	1050000	1080000	1000000	1040000	1135000	1183000	
Lao People's Democratic Republic	23086	29198	37244	31019	4350	13267	37271	32530	10788	

Nilai impor jasa konstruksi negara ASEAN (dalam ribu U.S. dollar)

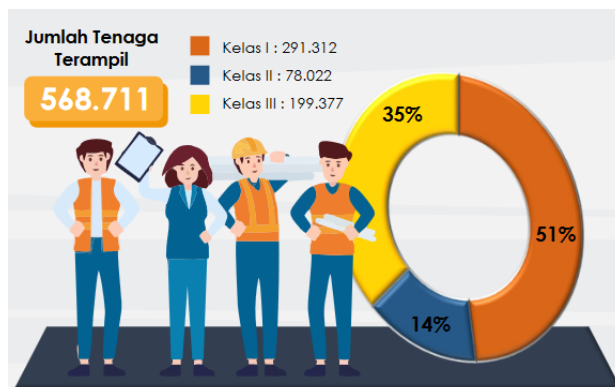
(<http://i-tip.wto.org/services/ChartResults.aspx> & [timeseries.wto.org/](http://timeseries.wto.org/))

Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi nasional terus berupaya mendorong peningkatan ekspor Indonesia melalui ekspor jasa konstruksi. Industri jasa konstruksi Indonesia yang dimotori oleh BUMN Karya terus mengembangkan pasar ke luar negeri. Selain PT. WIKA, BUMN Karya lainnya yang telah mengerjakan proyek di luar negeri yakni PT. Waskita Karya, PT. PP, PT. Brantas Abipraya, PT. Hutama Karya dan PT. Adhi Karya (pu.go.id, 2018). Selain BUMN karya tersebut, pada tahun 2018 terdapat 126.000 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di Indonesia dengan komposisi kontraktor kecil sebanyak 85%, menengah 14%, dan besar 1% (pu.go.id, 2018). Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 terdapat 159.308 perusahaan konstruksi, 120.384 perusahaan (75,56 persen) diantaranya adalah perusahaan skala kecil, 22.777 perusahaan (14, 29 persen) skala menengah, dan 1.541 perusahaan (0,96 persen) skala besar. Sedangkan 14.606 perusahaan (9,16 persen) lainnya merupakan perusahaan non kualifikasi (BPS, 2020). Mencermati komposisi tersebut, kesenjangan antara jumlah BUJK kecil dan menengah dengan BUJK besar masih besar, sehingga pemerintah terus berupaya memperkecil kesenjangan tersebut agar lebih banyak BUJK nasional yang dapat bersaing dengan BUJK asing. Sementara itu, dari 636 BUJK asing yang ada di Indonesia hanya sekitar 196 yang aktif dan 300 BUJK asing tidak aktif serta sekitar 30 sudah tutup karena tidak mendapat pekerjaan. Selain itu, masih sedikit kontraktor spesialis yang ada di Indonesia yaitu sekitar 5.900 dari 126.00 BUJK (pu.go.id, 2018).

Dari sisi SDM konstruksi, pada tahun 2018 tercatat 8,1 juta tenaga kerja bekerja di sektor konstruksi, tetapi kurang dari 10 % yang mempunyai sertifikat (pu.go.id, 2018). Indonesia memiliki 568.711 tenaga kerja bersertifikat keterampilan. Tenaga terampil dengan Sertifikat Keterampilan (SKT) Kelas I (minimal lulusan D1 dengan pengalaman minimal 3 tahun) sebesar 51%. Sedangkan persentase kelas II (minimal lulusan SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun atau SLTA dengan pengalaman minimal 3 tahun) dan kelas III (minimal lulusan SD dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SLTP dengan pengalaman minimal 2 tahun) sebesar 14% dan 35% (Kementerian PUPR, 2020).<sup>1</sup>

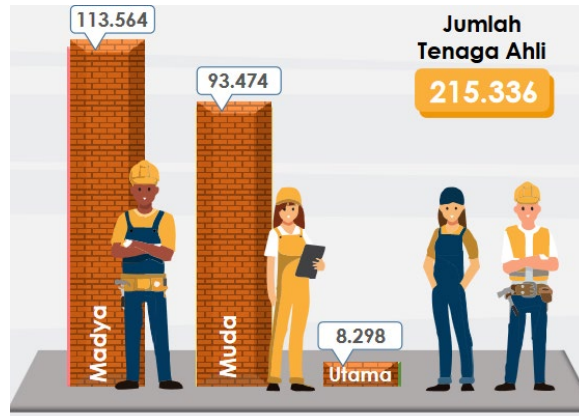
---

<sup>1</sup> Sertifikat Keterampilan (SKT) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, ke fungsian dan/atau keterampilan tertentu. Setiap badan usaha jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3) yang akan mengajukan permohonan sertifikat dan registrasi badan usaha harus memiliki tenaga kerja terampil bersertifikat, sebagai persyaratan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).



**Jumlah dan komposisi tenaga kerja konstruksi bersertifikat keterampilan**

Di samping tenaga kerja terampil, pada tahun 2020 terdapat 215.336 orang tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013 terdapat tiga kualifikasi tenaga ahli yaitu muda, madya, dan utama. Tenaga ahli yang sudah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkatkan menjadi ahli utama. Persentase Tenaga Ahli Madya<sup>2</sup> sebesar 52,73%. Sedangkan tenaga ahli muda<sup>3</sup> dan utama<sup>4</sup> masing-masing memiliki persentase sebesar 43,41% dan 3,85% (Kementerian PUPR, 2020).



**Jumlah dan komposisi tenaga ahli di sektor konstruksi**

Di sisi lain tenaga kerja Indonesia yang berkarya di sektor konstruksi luar negeri telah diakui karena memiliki sertifikasi dan terampil. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan daya

<sup>2</sup> minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 3 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun

<sup>3</sup> minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 1 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.

<sup>4</sup> minimal D4 dengan pengalaman minimal 6 tahun lulusan S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun, atau S1 Terapan dengan pengalaman minimal 4 tahun.

saing SDM konstruksi Indonesia, Kementerian PUPR terus berupaya melakukan percepatan sertifikasi. Selain SDM, industri konstruksi di Indonesia menghadapi permasalahan rantai pasok material. Tidak jarang pengusaha jasa konstruksi melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan material, padahal beberapa material mengalami oversupply, salah satu contohnya adalah semen yang masih tersedia hingga 6 tahun ke depan. Keempat adalah peralatan. Saat ini, hanya ada sekitar 70.000 sampai 80.000 unit peralatan di Indonesia. Namun, yang terdata masih sedikit yakni sekitar 26.000 (pu.go.id, 2018).

## BAB II

### SEKTOR JASA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

#### 2.1 Sektor Jasa dalam RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara *peers*. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal.

Peraturan Presiden No.18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut, perbaikan transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.



## 2.2 Sektor Jasa Konstruksi dalam RPJMN

Transformasi struktural pada sektor pembangunan infrastruktur difokuskan di sektor listrik dan konstruksi guna melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama konektivitas dan energi dalam rangka mendukung ekspansi ekonomi dan pertumbuhan inklusif. Selain itu, di dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan pula bahwa pengembangan industri konstruksi masih terbatas oleh beberapa aspek yaitu terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem dunia konstruksi. Akibat dari masih rendahnya kualitas SDM, produktivitas SDM konstruksi dalam negeri masih di bawah rata-rata internasional. Dari sisi ekosistem pengembangan dunia konstruksi, masih terdapat kendala kesiapan rantai pasok material konstruksi dan industri konstruksi yang relatif masih terpusat di pulau Jawa. Selain itu, upaya penggunaan teknologi digital seperti BIM (*building information modelling*) dalam industri konstruksi juga masih relatif rendah.

Lebih lanjut, selama ini pemerintah telah melakukan pembinaan konstruksi yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi, pendayagunaan *supply and demand* material, dan peralatan konstruksi (mesin dan material), tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, serta peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi melalui rasio kapitalisasi konstruksi. Upaya ini diharapkan



dapat mendorong timbulnya *multiplier effect* dari jasa konstruksi ke sektor ekonomi lainnya.

Di dalam RPJMN juga diakui bahwa industri konstruksi nasional menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Pada sisi SDM, kemampuan mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas. Sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana. Oleh karena itu, pembukaan pasar Indonesia untuk penyedia jasa konstruksi luar negeri dapat menjadi salah satu jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan SDM di sektor konstruksi dan mendorong pengembangan infrastruktur tahan gempa di Indonesia.

## BAB III

### KOMITMEN UNILATERAL DAN KOMITMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL SERTA OFFER SEKTOR JASA KONSTRUKSI

#### 3.1 Peraturan Domestik Mengenai Jasa Konstruksi

##### 3.1.1 UU Perdagangan dan UU terkait

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan mengenai definisi jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Selain itu, lingkup pengaturan perdagangan jasa yang dapat diperdagangkan meliputi 12 sektor jasa menurut klasifikasi W/120 yang dikeluarkan oleh WTO. Kedua belas sektor tersebut adalah 1) Jasa Bisnis; 2) Jasa Distribusi; 3) Jasa Komunikasi; 4) Jasa Pendidikan; 5) Jasa Lingkungan Hidup; 6) Jasa Keuangan; 7) Jasa Konstruksi dan Teknik Terkait; 8) Jasa Kesehatan dan Sosial; 9) Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olahraga; 10) Jasa Pariwisata; 11) Jasa Transportasi; dan 12) Jasa Lainnya. UU ini juga mengatur jasa yang diperdagangkan melalui 4 *Modes of Supply* yaitu mode 1 cross-border supply (pasokan lintas batas), Mode 2 Consumption Abroad (Konsumsi di Luar Negeri), Mode 3 Commercial Presence (Kehadiran Komersial) dan Mode 4 Movement of Natural Persons (Perpindahan Manusia).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi telah diubah melalui UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya untuk kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah (pasal 5, 6, 7, 8, 9, & 10); bentuk dan kualifikasi usaha (pasal 20); persyaratan usaha jasa konstruksi (pasal 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, & 35); penyelenggaraan jasa konstruksi (pasal 38 & 44); standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (pasal 59); pelatihan tenaga kerja konstruksi (pasal 69), registrasi pengalaman profesional (pasal 72); partisipasi masyarakat (pasal 84); dan sanksi administratif (pasal 89, 96, 99, & 102).

Selain itu beberapa pasal juga dihapuskan yaitu mengenai tanda daftar pengalaman (pasal 31); usaha penyediaan bangunan (pasal 36); pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara (pasal 42); jaminan kepada pengguna jasa (pasal 57); perjanjian penyediaan bangunan (pasal 58); tenaga kerja konstruksi asing (pasal 74); sanksi kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban (pasal 92); dan sanksi mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dari menteri (pasal 101).

##### 3.1.2 Peraturan Sektoral Jasa Konstruksi

Saat ini setidaknya terdapat beberapa peraturan sektoral yang mengatur jasa konstruksi, yaitu:

1. Peraturan Presiden No. 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
6. Permen PUPR No. 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Sebagian besar komitmen jasa konstruksi berfokus pada mode 3 (*commercial presence*), mengingat terdapatnya kebutuhan bagi pemasok jasa untuk mendirikan perusahaan di negara tujuan, sehingga berdasarkan pada Perpres No. 49 tahun 2021 & Permen PUPR No. 8 tahun 2019 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Asing yang akan menyediakan jasa di Indonesia perlu mendapatkan izin yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota berupa perizinan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan proses kepemilikan asing dilakukan dengan melakukan mitra atau joint venture dengan perusahaan atau badan hukum Indonesia.

### **3.2 Komitmen dan Offer Sektor Jasa Konstruksi di berbagai fora**

Putaran Uruguay adalah upaya negosiasi pertama secara multilateral untuk menghilangkan hambatan perdagangan dalam jasa konstruksi. Dalam Daftar Klasifikasi Sektoral Jasa (MTN.GNS/W/120), yang disusun selama Putaran Uruguay berdasarkan *United Nations Provisional-Central Product Classifications*, sektor jasa konstruksi mencakup subsektor jasa berikut:

1. *General construction work for buildings* (CPC 512), subkategori ini mencakup pekerjaan konstruksi (termasuk pekerjaan baru, penambahan, perubahan, dan renovasi) untuk semua jenis bangunan, tempat tinggal atau bukan tempat tinggal (*residential or nonresidential*), baik milik pribadi maupun milik umum (*publicly owned*).
2. *General construction work for civil engineering* (CPC 513), subkategori ini mencakup pekerjaan konstruksi untuk struktur selain bangunan (*structures other than buildings*), seperti jalan tol dan jalan raya (*highways and streets*), rel kereta api dan landasan pacu lapangan terbang (*airfield runways*), jembatan dan terowongan (*bridges and tunnels*), saluran air (*waterways*) dan pelabuhan (*harbours*), bendungan (*dams*), jaringan pipa (*pipelines*), saluran komunikasi dan saluran listrik (*communication and power lines*), pertambangan dan pabrik (*mining and*

*manufacturing plants*), serta stadion dan lapangan olahraga (*stadia and sports grounds*).

3. *Installation and assembly work* (CPC 514, 516), subsector ini meliputi kegiatan seperti perakitan dan pemasangan konstruksi prefabrikasi (*assembly and erection of prefabricated constructions*), pekerjaan instalasi untuk pemanas dan pendingin udara, pipa air (*water plumbing*), pemasangan gas (*gas fitting*), kabel listrik (*electrical wiring*), konstruksi alarm kebakaran (*fire alarm construction*), isolasi (*insulation*), dan konstruksi lift.
4. *Building completion and finishing work* (CPC 517), Subkategori ini mencakup pekerjaan konstruksi khusus untuk pnyempurnaan dan penyelesaian bangunan (*completion and finishing of buildings*), seperti pelapisan, plesteran, pengecatan, pemasangan ubin lantai dan dinding (*floor and wall tiling*), pertukangan, pemasangan dan dekorasi interior (*interior fitting and decoration*), dan pemasangan ornament (*ornamentation fitting*).
5. *Other* (CPC 511, 515, 518), subsector ini meliputi pre-erection work di tempat konstruksi (*pre-erection work at construction sites*) dan perdagangan khusus pekerjaan konstruksi (*special trade construction work*) seperti pekerjaan fondasi (*foundation work*), pengeboran air (*water well drilling*), pemasangan atap (*roofing*), pekerjaan pembetonan (*concrete work*). Subsector ini juga meliputi jasa penyewaan alat untuk konstruksi atau penghancuran bangunan (*equipment for construction or demolition*) atau pekerjaan teknik sipil dengan operator (*civil engineering works with operator*).

Selain kelima sektor jasa konstruksi tersebut, juga terdapat beberapa subsector yang terdapat dalam jasa bisnis (*Business Services*) yang terkait dengan penyediaan jasa konstruksi, di antaranya adalah *Architectural Services* (CPC 8671); *Engineering Services* (CPC 8672); *Integrated Engineering Services* (CPC 8673); dan *Urban Planning and Landscape Architectural Services* (CPC 8674).

Subsector-subsector tersebut diperdagangkan melalui empat *modes of supply*, yaitu:

- Mode 1 atau *Cross Border Supply*, mengacu pada penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lainnya (lintas batas), seperti pengiriman desain arsitektur secara elektronik, pengiriman cetak biru, dan jasa konsultasi terkait konstruksi.
- Mode 2 atau *Consumption Abroad*, mengacu pada pergerakan fisik konsumen jasa ke lokasi di mana jasa disediakan dan dikonsumsi.
- Mode 3 atau *Commercial Presence*, mengacu pada pembentukan afiliasi perusahaan atau anak perusahaan dari perusahaan jasa asing. Moda ini analog dengan investasi asing langsung (FDI) di bidang jasa konstruksi.
- Mode 4 atau *Movement of Natural Persons*, mengacu pada perpindahan sementara penyedia jasa untuk memberikan jasa kepada klien di pasar luar negeri, misalnya kontraktor asal Indonesia yang mengunjungi klien untuk konsultasi proyek jembatan di luar negeri.

Adapun sektor jasa konstruksi yang dikomitmenkan Indonesia terdapat di berbagai fora, mulai dari multilateral, regional dan bilateral. Penyusunan komitmen akses pasar yang dilakukan Indonesia dengan negara mitra menggunakan pendekatan positif dan negatif.

### 3.2.1 Multilateral

Pada fora multilateral, level komitmen yang diberikan tidak mendalam karena harus mengakomodir seluruh negara anggota WTO. Indonesia membuka komitmen di dua sektor terkait jasa konstruksi, yaitu *professional services* dan *construction and related engineering services*. Untuk moda 3 dari jasa profesional meliputi *Architectural Services; Engineering Service; Integrated Engineering Services*; dan *Urban Planning Services*, Indonesia mensyaratkan joint operation dan joint venture dengan perusahaan lokal. Persyaratan yang sama juga berlaku untuk *construction and related engineering services*, seperti di sub sektor *General construction work for building Construction work for building; General construction work for civil engineering; Installation and assembly work Assembly and erection of prefabricated construction; dan other related services*.

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE	1), 2) As specified in each sector 3) Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise. Joint venture should meet the following requirements: i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) ii) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s)	1), 2) As specified in each sector 3) The income Tax Law provides that non-resident taxpayers will be subject to withholding tax of 20% if they derive the following income from Indonesian source: a) Interest b) Royalties c) Dividend d) Fee from services performed in Indonesia Land Acquisition UU Pokok Agraria No.5 of 1960 stipulates that no foreigners (juridical and natural persons) are allowed to own land. However, a joint venture enterprise could hold the right for land use (Hak Guna Usaha) and building rights (Hak Guna	

	<p>4) Subject to Indonesian Labour and Immigration Laws and Regulations, only directors, managers and technical experts/advisors, unless mentioned otherwise, are allowed with a maximum stay of two years subject to one year extension. Manager and technical experts (intra corporate transfer) are allowed based on an economic needs test.</p>	<p>Bangunan), and they may rent/lease land and property. Any juridical and natural persons should meet professional qualification requirements.</p> <p>4) Expatriate Charges Any foreign natural persons supplying services are subject to charges levied by National, Provincial and Municipal Governments.</p> <p>Labour Laws and Regulations. Any expatriate employed by a joint-venture enterprise, representatives office, and/or other types of juridical person and/or an individual services provider must hold a valid working permit issued by the Ministry of Manpower.</p> <p>Immigration Laws and Regulations. Any expatriate must meet immigration requirements and procedures to enter the territory of the Republic of Indonesia</p>	
<b>BUSINESS SERVICES</b>			
<b>A. Professional Services</b>			
<p>Architectural Services (CPC 8671)</p>	<p>1) Unbound 2) None 3) (a) Joint operation To form a joint operation by establishing a representative office (b) Joint venture To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law</p>	<p>1) Unbound 2) Unbound 3) (a) Joint operation: 1. Registration fee requirement 2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Consultant Association having qualification A (b) Joint venture :</p>	

	4) As specified in the Horizontal Measures	Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Consultant Association and having qualification A. 4) As specified in the Horizontal Measures	
Engineering Service (CPC 8672 - except CPC 86721-86725-86726)	1) Unbound 2) None 3) (a) Joint operation To form a joint operation by establishing a representative office (b) Joint venture To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law  4) As specified in the Horizontal Measures	1) Unbound 2) Unbound 3) (a) Joint operation: 1. Registration fee requirement 2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Consultant Association having qualification A (b) Joint venture : Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Consultant Association and having qualification A. 4) As specified in the Horizontal Measures	
Advisory and Consultative (CPC 86721)	1) Unbound for government funded project 2) Unbound for government funded project 3) Joint operation through a representative office in Indonesia  4) Unbound except for director and technical expert	1) Unbound 2) Unbound 3) The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association 4) As specified in the Horizontal Measures	

<p>Engineering design services for industrial processes and production (CPC 86725)</p>	<p>1) Unbound for government funded project  2) Unbound for government funded project  3) Joint operation through a representative office in Indonesia    4) Unbound except for director and technical expert</p>	<p>1) Unbound  2) Unbound  3) The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association  4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
<p>f. Integrated Engineering Services (CPC 8673)</p>	<p>1) Unbound  2) None  3) (a) Joint operation  To form a joint operation by establishing a representative office  (b) Joint venture  To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law    4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1) Unbound  2) Unbound  3) (a) Joint operation:  1. Registration fee requirement  2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended  3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Consultant Association having qualification A  (b) Joint venture :  Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Consultant Association and having qualification A.  4) As specified in the Horizontal Measures</p>	



<p>Urban Planning Services (CPC 86742)</p>	<p>1) Unbound 2) None 3) (a) Joint operation To form a joint operation by establishing a representative office (b) Joint venture To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law  4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1) Unbound 2) Unbound 3) (a) Joint operation: 1. Registration fee requirement 2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Consultant Association having qualification A (b) Joint venture : Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Consultant Association and having qualification A. 4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
<b>CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES</b>			
<p>A. General construction work for building Construction work for building (CPC 512 except CPC 51210)</p>	<p>1) Unbound* 2) None 3) (a) Joint operation To form a joint operation by establishing a representative office (b) Joint venture To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law  4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1) Unbound* 2) Unbound 3) (a) Joint operation: 1. Registration fee requirement 2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A (b) Joint venture : Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A 4) As specified in the Horizontal Measures</p>	

<p>B. General construction work for civil engineering Construction work for civil engineering (CPC 513)</p>	<p>1) Unbound* 2) None 3) (a) Joint operation To form a joint operation by establishing a representative office (b) Joint venture To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law  4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1) Unbound* 2) Unbound 3) (a) Joint operation: 1. Registration fee requirement 2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A (b) Joint venture : Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A 4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
<p>C. Installation and assembly work Assembly and erection of prefabricated construction (CPC 514 - 5140)</p>	<p>1) Unbound* 2) None 3) (a) Joint operation To form a joint operation by establishing a representative office (b) Joint venture To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law  4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1) Unbound* 2) Unbound 3) (a) Joint operation: 1. Registration fee requirement 2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A (b) Joint venture : Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A 4) As specified in the Horizontal Measures</p>	

<p>E. Other - Pre-erection work at construction system (CPC 511 except CPC 51110 and 51113)</p>	<p>1) Unbound* 2) None 3) (a) Joint operation To form a joint operation by establishing a representative office (b) Joint venture To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law  4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1) Unbound* 2) Unbound 3) (a) Joint operation: 1. Registration fee requirement 2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A (b) Joint venture : Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A 4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
<p>- Special trade construction work (CPC 515 - 5155)</p>	<p>1) Unbound* 2) None 3) (a) Joint operation To form a joint operation by establishing a representative office (b) Joint venture To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law  4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1) Unbound* 2) Unbound 3) (a) Joint operation: 1. Registration fee requirement 2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended 3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A (b) Joint venture : Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A 4) As specified in the Horizontal Measures</p>	

<p>- Renting Services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works, with operator (CPC 518)</p>	<p>1) Unbound*  2) None  3) (a) Joint operation  To form a joint operation by establishing a representative office  (b) Joint venture  To establish a joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Measures and the Foreign Capital Investment Law    4) As specified in the Horizontal Measures</p>	<p>1) Unbound*  2) Unbound  3) (a) Joint operation:  1. Registration fee requirement  2. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended  3. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) member(s) of the Indonesian Contractors Association having qualification A  (b) Joint venture :  Local partner(s) in joint venture shall be member(s) of the Indonesian Contractors Association and having qualification A  4) As specified in the Horizontal Measures</p>	
---	---	---	--

Pada komitmen moda 4 atau orang perseorangan di sektor jasa konstruksi di WTO yang diizinkan masuk hanyalah *directors, managers and technical experts/advisors* yang harus memiliki izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan mematuhi peraturan imigrasi Indonesia dengan masa tinggal dua tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Persyaratan lain untuk *manager* dan *technical experts (intra corporate transfer)* harus berdasarkan *economic needs test*/uji kebutuhan ekonomi.

### 3.2.2 Regional

#### AFAS Paket 10

Pada tahun 2015, sejalan dengan pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC), AFAS menargetkan semua negara anggota mengizinkan perusahaan konstruksi dari ASEAN memiliki ekuitas asing hingga 70 persen (kecuali, Singapura yang mengizinkan 100 persen ekuitas asing). Sejalan dengan target tersebut Indonesia memberikan komitmen kepemilikan ekuitas asing sampai dengan 70 persen untuk subsektor *Architectural Services; Engineering Services; Integrated Engineering Services;* dan *Urban Planning Services*. Melalui mekanisme *joint venture* untuk moda 3, masuknya perusahaan konstruksi dari luar negeri dapat mendorong pemenuhan permintaan dari pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah. Selain itu, melalui mekanisme ini diharapkan industri jasa konstruksi di dalam negeri juga dapat berkembang dengan memperoleh pengalaman dan akses teknologi dari perusahaan konstruksi asing.

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
<b>BUSINESS SERVICES</b>			
<b>A. Professional Services</b>			
Architectural Services CPC 8671	(1) None (2) None (3) a) Joint operation: By establishing a representative office in Indonesia. b) Joint venture company: Not more than 70% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner (s)	(1) None (2) None (3) Registered Foreign Company shall form a Joint Operation or Joint Venture with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.	
Engineering Services CPC 8672 Except CPC 86721 and 86725	(1) None (2) None (3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. b) Joint venture company Not more than 70% of the capital share of the	(1) None (2) None (3) Registered Foreign Company shall form a Joint Operation or Joint Venture with local partner(s) which is (are) registered by	

	Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner (s)	Construction Services Development Board and having qualification A/Big.	
Engineering Design Services for Industrial Processes and Production CPC 86725	(1) None (2) None (3) None	(1) None (2) None (3) The company must be a member of Indonesian Consultant Association	
Engineering Services  Mould and dies (die-Casting, forging, Stamping, etc.)  Powder metallurgy CPC 86725**	(1) None (2) None (3) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia.  License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended	(1) None (2) None (3) License fee requirement  Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.	
Advisory and Consultative Services Related to Engineering CPC 86721	(1) None (2) None (3) None	(1) None (2) None (3) The company must be a member of Indonesian Consultant Association	
Integrated Engineering Services CPC 8673	(1) None (2) None (3) a) Joint operation: By establishing a representative office. b) Joint venture company: Not more than 70% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner (s)	(1) None (2) None (3) Registered Foreign Company shall form a Joint Operation or Joint Venture with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.	

<p>Urban Planning Services CPC 86741</p>	<p>(1) None (2) None (3) a) Joint operation: By establishing a representative office. b) Joint venture company: Not more than 70% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner (s)</p>	<p>(1) None (2) None (3) Registered Foreign Company shall form a Joint Operation or Joint Venture with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</p>	
<p>Landscape Architectural Services CPC 86742</p>	<p>(1) None (2) None (3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. b) Joint venture company: Not more than 51% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s)</p>	<p>(1) None (2) None (3) a) License fee requirement. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</p>	
<b>CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES</b>			
<p>Pre-erection Work at Construction Site CPC 511  Construction Work for Building CPC 512  Construction Work for Civil Engineering CPC 513  Assembly and Erection of Prefabricated Construction CPC 514</p>	<p>(1) Unbound* (2) None (3) a) Joint operation: By establishing a representative office in Indonesia. b) Joint venture company: Not more than 70% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s)</p>	<p>(1) Unbound* (2) None (3) Registered Foreign Company shall form a Joint Operation or Joint Venture with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</p>	

Special Trade Construction CPC 515			
Installation Work CPC 516			
Building Completion and Finishing Work CPC 517			
Renting Services Related Equipment for Construction or Demolition of Building or Civil Engineering Works with Operator CPC 518			

Perjanjian moda 4 di AFAS berada dalam perjanjian yang berbeda karena AFAS bertujuan untuk secara signifikan menghilangkan pembatasan perdagangan jasa dan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pemasok jasa di ASEAN. Sedangkan *ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons* (MNP) di sisi lain dimaksudkan untuk merampingkan prosedur bisnis bagi warga negara anggota ASEAN untuk dapat bekerja di Negara Anggota ASEAN lainnya. Di dalam *ASEAN MNP Agreement*, setiap tenaga kerja asing diatur berdasarkan regulasi tenaga kerja dan imigrasi. Dalam peraturan tersebut yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah *Director, Manager, dan Experts* dengan masa tinggal dua tahun dan dapat diperpanjang selama dua kali.

#### **ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)**

AANZFTA, dalam bab tentang Perdagangan Jasa, semakin meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan jasa kedua belah pihak. Elemen penting di bawah AANZFTA adalah ketentuan yang melindungi investasi dari pemasok jasa melalui Mode 3 atau *commercial presence*. Adapun komitmen liberalisasi perdagangan sektor jasa konstruksi Indonesia di dalam ASEAN-Australia New Zealand FTA meliputi *professional services* dan *construction and related engineering services*. Untuk *professional services*, komitmen Indonesia tidak jauh berbeda dengan komitmen Indonesia di dalam GATS, seperti sub sektor *Architectural Services; Engineering Service; Integrated Engineering Services; dan Urban Planning Services*. Selain itu untuk *construction and related*



*engineering services* relatif sama dengan komitmen Indonesia di dalam GATS, tetapi pada moda 3, pemerintah Indonesia membuka pasar untuk pemilikan modal asing hingga 55%.

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
<b>BUSINESS SERVICES</b>			
<b>A. Professional Services</b>			
Architectural Services CPC 8671	(1) None (2) None 3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law.	(1) None (2) None 3) a). License fee requirement b) Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) c) Local partners in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big	
Engineering Services CPC 8672 Except CPC 86721, 86725 and 86726	1) None 2) None 3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law.	1) None 2) None 3) a). License fee requirement b) Registered foreign company shall for a joint operation with local partner(s) c) Local partners in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big	
Advisory and Consultative Services Related to Engineering CPC 86721	1) None 2) None 3) Joint operation through a representative office in Indonesia	1) None 2) None 3) The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association	
Engineering Design Services for Industrial Processes and Production (CPC 86725)	1) None 2) None 3) Joint operation through a representative office in Indonesia	1) None 2) None 3) The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association	

<p>Integrated Engineering Services CPC 8673</p>	<p>1) None 2) None 3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law</p>	<p>1) None 2) None 3) a). License fee requirement b) Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big c) Local partners in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and</p>	
<p>Urban Planning Services CPC 86741</p>	<p>1) None 2) None 3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law.</p>	<p>1) None 2) None 3) a). License fee requirement b) Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big c) Local partners in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and ,having qualification A/Big</p>	
<b>CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES</b>			
<p>A. Construction Work for Buildings (CPC 512) B. Construction Work for Civil Engineering (CPC 513) C. Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC 514) C. Installation Work (CPC516) D. Building Completion and Finishing Work (CPC517)</p>	<p>1) Unbound 2) None 3) a) Joint operation: to form a joint operation by establishing a representative office in Indonesia b) Joint venture: to establish a limited liability enterprise (Perseroan Terbatas/PT Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s)</p>	<p>1) None 2) None 3) a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which(are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big b) Local partners in joint venture shall be registered by Construction Services</p>	

E. Pre-erection Work at Construction Site (CPC 511) F. Special Trade Construction(CPC 515) G. Renting Services Related Equipment for Construction or Demolition of Building or Civil Engineering Works with Operator (CPC 518)		Development Board and having qualification A/Big	
--	--	--	--

Pada moda 4 AANZFTA, hanya *Advisory and Consultative* dan *Engineering Design Services for Industrial Processes and Production* yang tidak dikomitmenkan/unbound kecuali untuk Direktur dan tenaga ahli teknis. Sedangkan untuk jasa profesional lain, seperti *Architectural Services*, *Engineering Services*, dan *Urban Planning Services* yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah Director, Manager, dan Experts dengan masa tinggal dua tahun dan dapat diperpanjang selama dua kali.

#### **ASEAN-India Trade in Services Agreement (AITISA)**

*ASEAN-India Trade in Services Agreement* ditandatangani pada November 2014. Pada perjanjian ini, Indonesia membuka pasarnya untuk penyedia jasa konstruksi dari India dengan ekuitas asing sebesar 51% untuk *Construction work for building; Construction work for civil engineering; dan Assembly and erection of prefabricated construction*. Untuk jasa profesional, Indonesia mengkomitmenkan *Architectural Services; Engineering Service; Integrated Engineering Services; dan Urban Planning Services*. Komitmen di jasa profesional ini juga mensyaratkan *joint operation* dan *joint venture* dengan perusahaan lokal Indonesia dengan lisensi pada *joint operation* selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Komitmen Indonesia dalam ASEAN-India TISA di sektor konstruksi dapat dilihat pada SOC di bawah ini.

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
<b>BUSINESS SERVICES</b>			
<b>A. Professional Services</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Architectural Services (CPC 8671)</li> <li>• Engineering Services (CPC 8672 except CPC 86721, 86725, 86726)</li> <li>• Integrated Engineering Services (CPC 8673)</li> <li>• Urban Planning Services (CPC 86741)</li> </ul>	<p>(1) None (2) None (3) a. Joint operation by establishing a representative office License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. b. Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law.</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	<p>(1) None (2) None (3) a. - License fee requirement - Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is(are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big b. Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big (4) As specified in the Horizontal Section</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Advisory and Consultative Services Related to Engineering (CPC 86721)</li> <li>• Engineering Design Services for Industrial Processes and Production (CPC 86725)</li> </ul>	<p>(1) None (2) None (3) Joint operation through a representative office in Indonesia (4) Unbound except for director and technical expert</p>	<p>(1) None (2) None (3) The Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesia Consultant Association (4) As specified in the Horizontal Section</p>	
<b>CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES</b>			
<p>A. General construction work for building Construction work for building (CPC 512 except CPC 51210)</p> <p>B. General construction work for civil engineering</p>	<p>(1) None (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law</p>	<p>(1) None (2) None (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big (b) Local partner(s) in joint venture shall be</p>	

<p>Construction work for civil engineering (CPC 513)</p> <p>C. Installation and assembly work Assembly and erection of prefabricated construction (CPC 514 - 5140)</p> <p>E. Other</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre-erection work at construction system (CPC 511 except CPC 51110 and 51113)</li> <li>- Special trade construction work (CPC 515 - 5155)</li> <li>- Renting Services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works, with operator (CPC 518)</li> <li>- Foundation work including pile driving (CPC 51510)</li> <li>- Gas fitting construction work (CPC 51630)</li> </ul>	<p>Not more than 51% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s)</p> <p>(4) Unbound</p>	<p>registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big</p> <p>(4) Unbound</p>	
---	---	--	--

Komitmen moda 4 untuk subsektor jasa bisnis yang terkait jasa konstruksi di AITISA yang diizinkan masuk hanyalah *directors, managers and technical experts/advisors* dengan masa tinggal dua tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Penyedia jasa asing juga berkewajiban untuk melakukan *transfer technology* dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja domestik serta memberikan pelatihan kerja bagi mereka. Sedangkan untuk jasa konstruksi tertutup/tidak dikomitmenkan.

## ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)

Hong Kong dan ASEAN memulai negosiasi FTA dan Perjanjian Investasi (Investment Agreement) pada Juli 2014. Setelah sepuluh putaran negosiasi, Hong Kong dan ASEAN mengumumkan kesimpulan negosiasi pada September 2017; dan menandatangani Perjanjian pada 12 November 2017. Pada perjanjian ini, untuk moda 3 dari sektor *construction and related engineering services*, Indonesia membuka subsektor *Construction Work for Building; Construction work for civil engineering; Assembly and erection of prefabricated construction; dan other construction services* dengan *capital share* mencapai 51 % dan dilakukan melalui *joint venture*. Sedangkan untuk national treatment, Indonesia masih menerapkan persyaratan biaya lisensi (*License fee requirement*) dan pendaftaran perusahaan jasa konstruksi asing yang bekerja di Indonesia. Lebih lanjut, komitmen Indonesia dalam perjanjian ASEAN-Hong Kong tersebut dapat dilihat pada SOC di bawah ini.

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
<b>CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES</b>			
<b>A. General construction work for building</b>			
Construction Work for Building CPC 512 Except CPC 51210	(1) Unbound (2) None (3) a) Joint operation: By establishing a representative office in Indonesia. Licence for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. b) Joint venture company by full filling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 51% of the capital share of the Limited Liability Enterprise ( Perseroan Terbatas/PT may be owned by foreign partner(s). 4). Unbound, except as indicated in the Horizontal Section	(1) Unbound (2) Unbound (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall from a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/ Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. 4). Unbound, except as indicated in the Horizontal Section	

B.General construction for civil engineering			
Construction work for civil engineering (CPC 513)	<p>(1) Unbound</p> <p>(2) None</p> <p>(3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 tyears and can be extended.</p> <p>b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more 51% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (perseroan Terbatas/PT) may be owned the foreign partner(s).</p> <p>4) Unbound, except as indicated in the Horizontal Section.</p>	<p>(1) Unbound</p> <p>(2) Unbound</p> <p>(3) (a) 1. License fee requirement.</p> <p>2. Registered foreign company shall form a join operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</p> <p>(b). Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services development Board and having qualification A/Big.</p> <p>4). Unbound, except as indicated in the Horisontal Section.</p>	
C.Installation and assembly work			
Assembly and erection of prefabricated construction (CPC 524)	<p>1) Unbound</p> <p>2) None</p> <p>3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extende.</p> <p>(b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not More than 51% of the capital share of the Limited Liability Enterprise ( Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s).</p> <p>4). Unbound, except as indicated in tthe Horizontal section</p>	<p>1) Unbound</p> <p>2) Unbound</p> <p>3) (a) 1. License fee requirement</p> <p>2. Registered foreign company shall form a joint operation with local parter(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</p> <p>(b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</p> <p>4).Unbound except as indicated in the Horisontal Section</p>	

D.Other			
Pre-erection work at construction system (CPC 511 except CPC 51110 and 51113)	1) Unbound 2) None 3) (a) Joint operation by establishing office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 51% of the capital share of the Limited Liability Enterprise ( Perseroan Terbatas/PT may be owned by foreign partner(s).	(1) Unbound (2) Unbound (3) (a) 1. License fee requirement. 2. Registered foreign company shall form a join operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b). Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services development Board and having qualification A/Big.	
Renting Services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works, with operator (CPC 518)			
Foundation work including pile driving (CPC 51510)	4). Unbound, except as indicated in the Horizontal Section	4). Unbound, except as indicated in the Horizontal Section.	
Gas fitting construction work (CPC 51630)			

Pada moda 4 (MNP) menjadi subjek dari peraturan perundangan ketenagakerajaan dan imigrasi, di mana hanya *director, manajer, dan technical expert* yang diperbolehkan tinggal selama dua tahun dengan masa perpanjangan dua kali dua tahun.

### **ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)**

ASEAN dan Korea memantapkan kemitraan mereka dengan menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation pada ASEAN-Republic of Korea Summit ke-9* pada 13 Desember 2005, yang antara lain mengatur tentang pembentukan ASEAN-Republic of Korea Free Trade Area (AK-FTA). Perjanjian tersebut juga meliputi perdagangan jasa yang mulai berlaku pada Mei 2009 dan bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen liberalisasi perdagangan jasa dengan cakupan substansial, dan meningkatkan daya saing dan efisiensi di masing-masing sektor jasa. Pada perjanjian ini, Indonesia untuk moda 3 (*commercial presence*) membuka pasar bagi perusahaan asing yang tergabung dalam AKFTA dengan *foreign equity* hingga mencapai 55% dalam *joint venture* yang dilakukan dengan perusahaan jasa konstruksi lokal. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada SOC berikut ini.



Sector or Sub-sector	Limitation on Market Access	limitation on National Treatment	Additional Commitments
<b>BUSINESS SERVICES</b>			
A. Professional Services			
Architectural Services (CPC 8671) Engineering Services (CPC 8672 except CPC 86721-86725-86726) Integrated Engineering Services (CPC 8673) Urban Planning Services (CPC 86741)	1) None 2) None 3) a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law 4) As specified in the Horizontal Section	1) None 2) None 3) a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall for a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big b) Local partner (s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big 4) As specified in the Horizontal Section	
Advisory and Consultative Services Related to Engineering (CPC 86721)	1) None 2) None 3) Joint operation through representative office in Indonesia 4) Unbound except for director and technical expert	1) None 2) None 3) The Indonesian participant in joint operation must be a member of Indonesian Consultant Association 4) As specified in the Horizontal Section	
Engineering Design Services for Industrial Processes and Production (CPC 86725)	1) None 2) None 3) Joint operation through representative office in Indonesia 4) Unbound except for director and technical expert	1) None 2) None 3) The Indonesian participant in joint operation must be a member of Indonesian Consultant Association 4) As specified in the Horizontal Section	

CONSTRUCTION SERVICES AND RELATED ENGINEERING SERVICES			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre-erection Work at Construction Site (CPC 511)</li> <li>• Construction Work for Buildings (CPC 512)</li> <li>• Construction Work for Civil Engineering (CPC513)</li> <li>• Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC 514)</li> <li>• Special Trade Construction (CPC 515) Installation Work (CPC516)</li> <li>• Building Completion and Finishing Work (CPC517)</li> <li>• Renting Services Related Equipment for Construction or Demolition of Building or Civil Engineering Works with Operator (CPC 518)</li> </ul>	1) Unbound 2) None 3) a) Joint operation: to form a joint operation by establishing a representative office in Indonesia. b) Joint venture: to establish a limited liability enterprise (Perseroan Terbatas/PT) Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT)  4) As specified in the Horizontal Section	1) Unbound 2) None 3) a) Joint Operation Registration License fee requirement License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) entity(ties) certified according to prevailing laws and regulations. b) Joint Venture The establishment of joint venture company would need to have a local partner(s) which is (are) entity(ties) certified according to prevailing laws and regulations Not more than 55% of the capitalshare as the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) 4) As specified in the Horizontal Section	

Pada moda 4 (MNP) menjadi subjek dari peraturan perundangan ketenagakerajaan dan imigrasi, di mana hanya *director*, *manager*, dan *technical expert* yang diperbolehkan tinggal selama dua tahun dengan masa perpanjangan dua kali dua tahun. Dalam konteks *intra corporate transfer* diperbolehkan dengan persyaratan melakukan *economic needs test*.

#### ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)

Saat ini China merupakan salah satu negara pengeksport konstruksi yang besar di dunia, oleh karena itu terdapat nilai penting dari masuknya perusahaan konstruksi China ke Indonesia. Melalui pembentukan *joint operation* ataupun *joint venture* antara perusahaan China dan Indonesia maka diharapkan dapat mendorong terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan di sektor jasa konstruksi. Dari SOC di bawah ini dapat kita lihat bahwa *market access* ke Indonesia di batasi oleh perlunya kerja sama dalam bentuk joint venture dimana perusahaan asing dapat memiliki ekuitas hingga 55%. Komitmen ini terdapat pada sub sektor

*General construction work for building; General construction work for civil engineering; Installation and assembly work Assembly and erection of prefabricated construction; dan other construction services.*

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
<b>CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES</b>			
<p>A. General construction work for building Construction work for building (CPC 512 except CPC 51210)</p>	<p>(1) Unbound* (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s). (4) As specified in the Horizontal Section</p>	<p>(1) Unbound* (2) Unbound* (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (4) As specified in the Horizontal Section</p>	
<p>B. General construction work for civil engineering Construction work for civil engineering (CPC 513)</p>	<p>(1) Unbound* (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign</p>	<p>(1) Unbound* (2) Unbound (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</p>	

	partner(s). (4) As specified in the Horizontal Section	(4) As specified in the Horizontal Section	
C. Installation and assembly work Assembly and erection of prefabricated construction (CPC 514)	(1) Unbound* (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s). (4) As specified in the Horizontal Section	(1) Unbound* (2) Unbound (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (4) As specified in the Horizontal Section	

<p>D. Other</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre-erection work at construction system (CPC 511 except CPC 51110 and 51113)</li> <li>- Steel binding and erection (incl. welding) (CPC 51550)</li> <li>- Renting Services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works, with operator (CPC 518)</li> <li>- Foundation work including pile driving (CPC 51510)</li> <li>- Gas fitting construction work (CPC 51630)</li> <li>- Fire alarm construction work (CPC 51642)</li> <li>- Burglar alarm system construction work (CPC 51643)</li> <li>- Lift and escalator construction work (CPC 51691)</li> </ul>	<p>(1) Unbound*</p> <p>(2) None</p> <p>(3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended.</p> <p>(b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law.</p> <p>Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s).</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	<p>(1) Unbound*</p> <p>(2) Unbound</p> <p>(3) (a) 1. License fee requirement</p> <p>2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</p> <p>(b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</p> <p>(4) As specified in the Horizontal Section</p>	
--	---	---	--

Pada moda 4 dalam perjanjian ACFTA, seperti yang disebutkan dalam *horizontal commitment*, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian, hanya para direktur, manajer, dan tenaga ahli/penasihat teknis, kecuali disebutkan lain, diizinkan untuk tinggal selama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimum dua kali dengan masing-masing

perpanjangan selama dua tahun. Manajer dan tenaga ahli teknis (pengalihan di dalam perusahaan) diizinkan berdasarkan suatu pengujian kebutuhan ekonomi.

### Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

RCEP ditandatangani pada tanggal 15 November 2020 oleh sepuluh negara ASEAN, yaitu Australia, New Zealand, China, Jepang, dan Korea. Dalam perjanjian ini, jadwal komitmen dibuat dalam bentuk *negative list*, selain yang tercantum dalam jadwal komitmen ini dibuka untuk penyedia jasa dari negara ASEAN lainnya. Dalam RCEP, Indonesia menerapkan kewajiban membentuk joint operation atau joint venture ketika perusahaan asing akan masuk ke Indonesia. Dalam *joint venture ini*, pemilik modal asing dapat memiliki share dari 51% - 55%. Secara lebih jelas komitmen Indonesia di dalam RCEP dapat dilihat pada SOC di bawah ini.

Sector	:	Professional Services
Subsector	:	(a) Architectural Services (CPC 8671) (b) Engineering Services (CPC 8672 excluding CPC 86721, 86725, 86726) (c) Integrated Engineering Services (CPC 8673) (d) Urban Planning Services (CPC 86741) (e) Landscape Architectural Services (CPC 86742)
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description	:	Trade in Services Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that require: (a) commercial presence only in the form of:  (i) a joint operation by establishing a representative office in Indonesia. Permit for representative office shall be valid for three years and can be extended; or  (ii) a joint venture company established in accordance with applicable laws and regulations concerning foreign commercial presence.

	<p>(b) no more than 51 per cent of the equity participation in a joint venture shall be owned by foreigners;</p> <p>(c) permit requirements for foreign service suppliers may vary from that applicable to Indonesian service suppliers; and</p> <p>(d) foreign service suppliers shall only provide services in relation to projects that use advanced technology or are high risk or high capital. The qualifier of advance technology, high risk, and high cost will be in accordance with prevailing laws and regulations at the time of supplying the services.</p> <p>Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(i) and (r)(ii) of Article 8.1 (Definitions) of Landscape Architectural Services (CPC 86742).</p>
--	---

Sector	:	Professional Services
Subsector	:	Advisory and Consultative Engineering Services (CPC 86721)
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description	:	Trade in Services Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that require commercial presence in the form of joint operation through a representative office in Indonesia, provided that the domestic partner is a member of an Indonesian consultant association.

Sector	:	Professional Services
Subsector	:	Engineering Design Services for Industrial Processes and Production (CPC 86725**) only for steel mill, oil & gas, gas turbine industries (a) Mould and dies (die-casting, forging, stamping, etc.)  (b) Powder metallurgy
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4)

		Market Access (Article 8.5)
Description	:	Trade in Services Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that require the supply through commercial presence in the form of joint venture subject to a condition that the domestic partner in the joint venture is a member of an Indonesian consultant association.

Sector	:	Professional Services
Subsector	:	Engineering Design Services for Industrial Processes and Production (CPC 86725**) only for materials flows, equipment layout, material handling systems, processes and process control (which may integrate computer technology) for manufacturing plants
Type of Obligation	:	National Treatment (Article 8.4) Market Access (Article 8.5)
Description	:	Trade in Services Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that require the supply through commercial presence in the form of joint venture subject to a condition that the domestic partner in the joint venture is a member of an Indonesian consultant association.

Sector	:	Construction and Related Engineering Services
Subsector	:	(ii) Construction Work for Buildings (CPC 512) excluding one- and two-dwelling buildings (CPC 51210) (iii) Construction Work for Civil Engineering (CPC 513) (iv) Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC 514) (v) Installation Work (CPC 516) (vi) Building Completion and Finishing Work (CPC 517) (vii) Pre-erection Work at Construction Site (CPC 511) excluding Site Investigation Work (CPC 51110) and Site Formation and Clearance Work (CPC 51113) (viii) Special Trade Construction (CPC 515)



		(ix) Renting Services Related Equipment for Construction or Demolition of Building or Civil Engineering Works with Operator (CPC 518)
Type of Obligation	:	Market Access (Article 8.5) Most-Favoured-Nation Treatment (Article 8.6)
Description	:	Trade in Services Indonesia reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to trade in services as defined in subparagraph (r)(iii) of Article 8.1 (Definitions) that requires supply through commercial presence to be subject to following conditions: (a) commercial presence only in the form of:  (i) joint operation by establishing a representative office in Indonesia. Permit for representative office shall be valid for three years and can be extended; or  (ii) joint venture company established in accordance with applicable laws and regulations concerning foreign commercial presence; and  (b) no more than 55 per cent of the equity participation in a joint venture of the commercial presence shall be owned by foreigners.

Komitmen pada moda 4 sebagian besar dibuka hanya level manajemen atas dalam suatu kantor perwakilan dan berkewarganegaraan Indonesia, kecuali untuk subsektor *Engineering Design Services for Industrial Processes and Production (CPC 86725\*\*)* only for *steelmill, oil & gas, gas turbine industries, materials flows, equipment layout, material handling systems, processes and process control (which may integrate computer technology) for manufacturing plants* terbuka/none.

### 3.2.3 Bilateral

#### Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IECEPA)

Pada kesepakatan Indonesia-EFTA di sektor jasa konstruksi, untuk moda 3, tidak jauh berbeda dengan perjanjian liberalisasi perdagangan jasa dengan India dan Hong Kong. Pada perjanjian ini Indonesia membuka akses pasar bagi kehadiran perusahaan jasa konstruksi asing dengan ekuitas mencapai 51%, yang meliputi subsektor *Construction Work for Buildings; Construction Work for Civil Engineering; Assembly and Erection of Prefabricated Constructions; Special Trade Construction; dan Renting Services Related Equipment for Construction*. Begitu pula dengan national treatment, dimana perusahaan konstruksi asing yang akan masuk ke Indonesia diwajibkan membayar biaya lisensi dan melakukan *joint venture* dengan perusahaan lokal Indonesia.

BUSINESS SERVICES			
Sector or subsectors	Limitation on Market Access	limitation on National Treatment	Additional Commitments
<b>BUSINESS SERVICES</b>			
Architectural Services (CPC 8671)	1) None 2) None 3) None except:	1) None 2) None 3) None except:	
Engineering Services (CPC 8672 except CPC 86721, 86725 and 86726)	a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia with qualification Big.License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. b) Joint venture company with foreign equity participation up to 51%	a) 1. License fee requirement; 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having big qualification. b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having big qualification. c) Foreign service suppliers shall only provide services with high risk, high technology, and/or high capital. The qualifier of high risk, high technology and high capital will be in accordance with prevailing laws and	

	4) Unbound except as indicated in the horizontal section	regulations at the time of supplying the services; and d) Highest management in a representative office shall be Indonesian. 4) Unbound except as indicated in the horizontal section	
Advisory and Consultative Services Related to Engineering (CPC 86721)  Engineering Design Services for Industrial Processes and Production (CPC 86725)	1) None 2) None 3) None except joint operation through a representative office in Indonesia  4) Unbound except for director and specialist	1) None 2) None 3) None except the Indonesian participant in joint operation must be member of Indonesian Consultant Association 4) Unbound except as indicated in the horizontal section	
Integrated Engineering Services (CPC 8673)  Urban Planning Services (CPC 86741)	1) None 2) None 3) None except: a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. Licenses for representative offices shall be valid for 3 years and can be extended. b) Joint venture company  4) Unbound except as indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) None except: a) 1. License fee requirement; 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having big qualification. b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having big qualification. 4) Unbound except as indicated in the horizontal section	
<b>CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES</b>			
A. Construction Work for Buildings (CPC 512 except 51210)  B. Construction Work for Civil Engineering (CPC 513)	1) Unbound* 2) None 3) None except: a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia.	1) Unbound* 2) Unbound 3) None except: a) 1. License fee is requirement; 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is	

<p>C. Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC 514)</p> <p>Pre-erection Work at Construction Site (CPC 511 except CPC 51110 and CPC 51113)</p> <p>Special Trade Construction (CPC 515-5155)</p> <p>Renting Services Related Equipment for Construction or Demolition of Building or Civil Engineering Works with Operator(CPC 518)</p>	<p>License for representative office shall be valid for three years and can be extended.</p> <p>b) Joint venture company with foreign equity participation up to 51%.</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	<p>(are) registered by Construction Services Development Board and having big qualification.</p> <p>b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having big qualification.</p> <p>4) Unbound except as indicated in the horizontal section</p>	
---	---	---	--

Pada komitmen moda 4 atau orang perseorangan untuk sektor jasa konstruksi di IECEPA yang diizinkan masuk hanyalah directors, managers and specialist yang harus memiliki izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan mematuhi peraturan imigrasi Indonesia dengan masa tinggal dua tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Persyaratan lain untuk *manager* dan *specialist (intra corporate transfer)* harus berdasarkan *economic needs test*/uji kebutuhan ekonomi. Selain itu *installers* dapat masuk hanya untuk spesialis berkualifikasi yang merupakan karyawan perusahaan di Negara EFTA yang tidak memiliki kehadiran komersial di Indonesia dalam menyediakan jasa pemasangan untuk mesin atau peralatan industri.

### Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Pada kesepakatan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* di sektor jasa konstruksi, untuk moda 3, persentasi kepemilikan asing untuk *comercial presence* mencapai 55%. Selain itu, perusahaan asing diwajibkan melakukan *joint venture* dengan perusahaan jasa konstruksi Indonesia. Hal ini berlaku untuk sub sektor *Construction Work for Buildings*;

*Construction Work for Civil Engineering; Assembly and Erection of Prefabricated Constructions; dan other construction services.* Selain itu, terdapat *limitation on national treatment* dimana perusahaan jasa Indonesia yang akan melakukan *joint venture* harus dengan kualifikasi A atau perusahaan besar.

<b>BUSINESS SERVICES</b>			
<b>Sector or subsectors</b>	<b>Limitation on Market Access</b>	<b>limitation on National Treatment</b>	<b>Additional Commitments</b>
Architectural Services (CPC 8671)  Urban Planning Services (CPC 86741)  Integrated Engineering Services (CPC 8673)  Engineering Services (CPC8672-except CPC 86721and 86725)	1) Unbound 2) None 3) Services must be supplied through: (a) joint operation by establishing a representative office inIndonesia. License for representative office shall be valid for three years and can be extended ; and/or (b) joint venture enterprise by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Investment Law and its implementing regulations.  4) As specified in the Horizontal Section	1) Unbound 2) Unbound 3) (a) 1. License fee is required in accordance with the relevant laws and regulations; and 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture enterprise shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. 4) As specified in the Horizontal Section	
<b>CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES</b>			
A. General construction work for building Construction work for building (CPC 512 except CPC 51210)  B. General construction work for civil engineering Construction work for civil engineering (CPC 513)  C. Installation and assembly work Assembly and erection	1) Unbound 2) None 3) Services must be supplied through: (a) joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for three years and can be extended; and/or (b) joint venture enterprise by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Investment Law and its implementing regulations. Notwithstanding limitations specified in the Horizontal Section, not more than 55% of the	1) Unbound 2) Unbound 3) (a) 1. License fee is required in accordance with the relevant laws and regulations; and 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture enterprise shall be registered by Development Board and having qualification A/Big.	

<p>of prefabricated construction (CPC 514)</p> <p>Other Pre-erection Work at Construction Site (CPC 511 except CPC 51110 and CPC 51113)</p> <p>Steel binding and erection (including welding)(CPC 51550)</p> <p>Renting Services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works, with operator(CPC 518)</p> <p>Foundation work including pile driving (CPC 51510)</p> <p>Gas fitting construction work (CPC 51630)</p> <p>Fire alarm construction work (CPC 51642)</p> <p>Burglar alarm system construction work (CPC 51643)</p>	<p>capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s).</p> <p>4) As specified in the Horizontal Section</p>	<p>4) As specified in the Horizontal Section</p>	
--	---	--	--

Pada komitmen moda 4 atau orang perseorangan untuk sektor jasa konstruksi di IJEPA yang diizinkan masuk hanyalah *directors, managers and technical experts/advisors* yang harus memiliki izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan mematuhi peraturan imigrasi Indonesia dengan masa tinggal dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali dengan

masing-masing perpanjangan dua tahun. Persyaratan lain untuk manager dan *technical experts/advisors (intra corporate transfer)* harus berdasarkan economic needs test/uji kebutuhan ekonomi.

### Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA)

Tidak jauh berbeda dengan kesepakatan bilateral Indonesia lainnya, pada kesepakatan perdagangan jasa antara Indonesia dan Australia, Pemerintah Indonesia mengizinkan persentase kepemilikan asing untuk commercial presence mencapai 55%. Selain itu, perusahaan asing diwajibkan melakukan *joint venture* dengan perusahaan jasa konstruksi Indonesia. Hal ini berlaku untuk subsektor *Construction Work for Buildings; Construction Work for Civil Engineering; Assembly and Erection of Prefabricated Constructions; dan other construction services*. Selain itu, kesamaan *national treatment* diberikan kepada Australia di mana perusahaan jasa Indonesia yang akan melakukan *joint venture* harus dengan kualifikasi A atau perusahaan besar dan memiliki kewajiban untuk melakukan registrasi dengan pelaku jasa konstruksi dari luar negeri, dalam hal ini adalah dari Australia.

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
<b>BUSINESS SERVICES</b>			
Architectural Services (CPC 8671)	(1) None (2) None (3) None, except commercial presence only permitted in the form of:	(1) None (2) None (3) None except:	
Engineering Services (CPC 8672 except CPC 86721, 86726)	a) Joint operation by establishing a representative office with qualification big; or.	a) No more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners;	
Integrated Engineering Services (CPC 8673)	b) Joint venture.	b) License fee requirement for foreign service suppliers that may vary from that applicable to Indonesian service suppliers;	
Urban Planning Services (CPC 86741)		c) Indonesian local partners shall have qualification big;	

	(4) As specified in the Horizontal Section	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Foreign service suppliers shall only provide services with high risk, high technology, or high capital; and</li> <li>e) Highest management in a representative office shall be Indonesian.</li> </ul> (4) As specified in the Horizontal Section	
Advisory and Consultative Engineering Services (CPC 86721)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) None</li> <li>(2) None</li> <li>(3) None, joint operation by establishing a representative office.</li> </ul> (4) As specified in the Horizontal Section	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) None</li> <li>(2) None</li> <li>(3) None except Indonesian local partner in the joint operation must be a member of the Indonesian Consultant Association.</li> </ul> (4) As specified in the Horizontal Section	
Landscape Architectural Services (CPC 86742)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) None</li> <li>(2) None</li> <li>(3) None, except commercial presence only permitted in the form of: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Joint operation by establishing a representative office with qualification big; or.</li> <li>b) Joint venture.</li> </ul> </li> </ul> (4) As specified in the Horizontal Section	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) None, except local presence requirements</li> <li>(2) None</li> <li>(3) None except: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) No more than 67 per cent of the capital share in a joint venture shall be owned by foreigners;</li> <li>b) License fee requirement for foreign service suppliers that may vary from that applicable to Indonesian service suppliers;</li> <li>c) Indonesian local partners shall have qualification big;</li> <li>d) Foreign service suppliers shall only provide services with high risk, high technology, or high capital; and</li> <li>e) Highest management in a representative office shall be Indonesian.</li> </ul> </li> </ul> (4) As specified in the Horizontal Section	



<b>CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES</b>			
<p>A. General construction work for building Construction work for building (CPC 512 except CPC 51210)</p>	<p>(1) Unbound* (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s). (4) As specified in the Horizontal Section</p>	<p>(1) Unbound* (2) Unbound (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (4) As specified in the Horizontal Section</p>	
<p>B. General construction work for civil engineering Construction work for civil engineering (CPC 513)</p>	<p>(1) Unbound* (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s). (4) As specified in the Horizontal Section</p>	<p>(1) Unbound* (2) Unbound* (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services (4) As specified in the Horizontal Section</p>	

<p>C. Installation and assembly work Assembly and erection of prefabricated construction (CPC 514)</p>	<p>(1) Unbound*  (2) None  (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended.  (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in    (4) As specified in the Horizontal Section</p>	<p>(1) Unbound*  (2) Unbound*  (3) (a) 1. License fee requirement  2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.  (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services  (4) As specified in the Horizontal Section</p>	
--	--	--	--

<p>D. Other</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre-erection work at construction system (CPC 511 except CPC 51110 and 51113)</li> <li>- Steel binding and erection (incl. welding) (CPC 51550)</li> <li>- Renting Services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works, with operator (CPC 518)</li> <li>- Foundation work including pile driving (CPC 51510)</li> <li>- Gas fitting construction work (CPC 51630)</li> <li>- Fire alarm construction work (CPC 51642)</li> <li>- Burglar alarm system construction work (CPC 51643)</li> <li>- Lift and escalator construction work (CPC 51691)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Unbound*</li> <li>(2) None</li> <li>(3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended.</li> <li>(b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law.</li> <li>Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s).</li> <li>(4) As specified in the Horizontal Section</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Unbound*</li> <li>(2) Unbound*</li> <li>(3) (a) 1. License fee requirement</li> <li>2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.</li> <li>(b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services</li> <li>(4) As specified in the Horizontal Section</li> </ul>	
--	--	---	--

Pada komitmen moda 4 atau orang perseorangan untuk sektor jasa konstruksi di IACEPA yang diizinkan masuk hanyalah *directors, managers and technical experts/advisors* yang harus memiliki izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan mematuhi peraturan imigrasi Indonesia dengan masa tinggal dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali dengan masing-masing perpanjangan dua tahun. Persyaratan lain untuk manager dan *technical experts/advisors (intra corporate transfer)* harus berdasarkan economic needs test/uji kebutuhan ekonomi.

## BAB IV

### POTENSI PERUNDINGAN DI SEKTOR JASA KONSTRUKSI

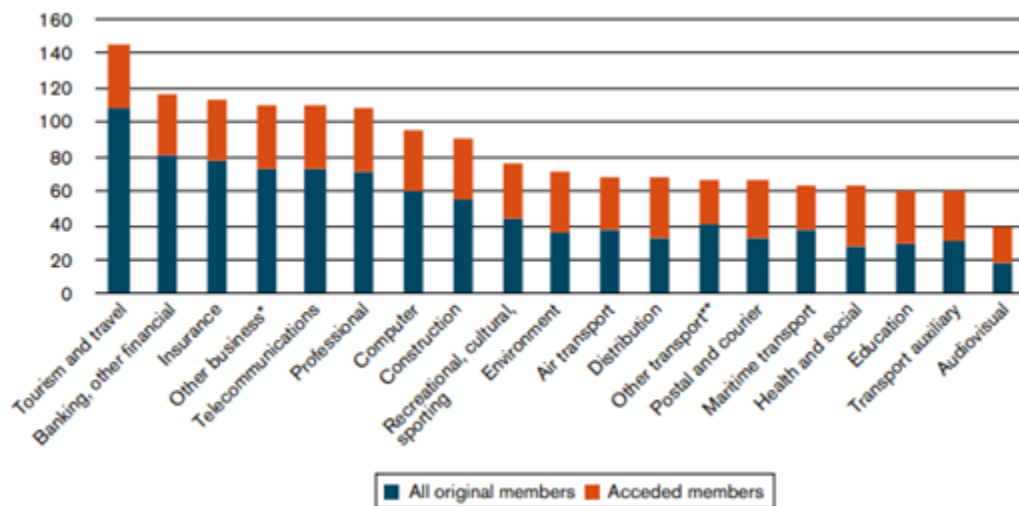
Saat ini sejumlah perusahaan jasa konstruksi Indonesia telah mampu melakukan ekspor ke Uni Emirat Arab, Aljazair, Timor Leste, Malaysia, Taiwan, Filipina, Myanmar, hingga Solomon di Kepulauan Pasifik dan Republik Niger. Hal ini menjadi peluang ekspor yang cukup besar bagi perusahaan jasa konstruksi asal Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Pasar di wilayah Afrika memiliki potensi yang besar tetapi belum memiliki teknologi tinggi untuk proses pembangunan infrastruktur dengan jumlah competitor yang relative lebih sedikit, serta belum memiliki banyak competitor sehingga peluang untuk masuknya akan lebih besar.

Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan peninjauan terkait dengan kemungkinan pembicaraan liberalisasi perdagangan di sektor jasa, khususnya jasa konstruksi ke wilayah Afrika dan Timur Tengah. Negosiasi ini tidak hanya akan membuka peluang pasar bagi penyedia jasa konstruksi asal Indonesia, tetapi juga dapat menjadi pasar bagi produk Indonesia baik yang langsung terkait dengan sektor jasa konstruksi maupun tidak. Misalnya saja seiring dengan penyediaan infrastruktur transportasi berupa rel kereta maka penyedia jasa perkeretaapian juga dapat terlibat dalam perdagangan jasa tersebut di sejumlah negara Afrika. Selain itu, ekspor jasa konstruksi ke Afrika juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor sejumlah komoditas Indonesia, salah satunya adalah semen. Pada akhirnya, perundingan perdagangan jasa di sektor infrastruktur dapat mendorong terjadinya *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.

## BAB V

### ISU PERUNDINGAN DI SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Beberapa sektor jasa di dalam GATS cenderung menarik lebih banyak komitmen daripada yang lain. Misalnya, jasa pariwisata, keuangan, telekomunikasi, jasa computer, dan jasa konstruksi telah menarik komitmen dari mayoritas anggota WTO, sementara sektor lain, seperti transportasi, distribusi, kurir pos, layanan lingkungan atau audiovisual menarik komitmen yang lebih sedikit, seperti tergambar pada grafik di bawah ini.



\* Business services other than professional and computer and related services

\*\* Transport other than maritime, air, and auxiliary services to all modes of transport

Komitmen di dalam GATS berdasarkan Sektor (WTO secretariat, 2019)

Seiring banyaknya negara yang memberikan komitmen di sektor jasa konstruksi, maka isu yang muncul dalam setiap fora yang dinotifikasi ke WTO akan beragam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar komitmen jasa konstruksi berfokus pada mode 3, maka terdapat sejumlah pembatasan akses pasar (*market access restriction*) yang umum ditemukan dan mempengaruhi sektor ini. Salah satu isu tersebut adalah penyedia jasa konstruksi asing membutuhkan kerja sama dengan penyedia jasa lokal dalam satu badan hukum tertentu, sehingga menghambat kehadiran perusahaan yang menyediakan jasa berbasis proyek dengan waktu pengerjaan yang singkat. Persyaratan untuk memiliki mitra lokal sebagai syarat untuk penyediaan jasa konstruksi, dan pembatasan penyertaan modal asing juga sering terjadi. Misalnya, sejumlah SOC memungkinkan *commercial presence* hanya dalam bentuk *joint-venture* dengan partisipasi modal asing tidak melebihi 30, 49, 50 atau 51 persen.

Pada tingkat global, tidak harus selalu diasumsikan bahwa perusahaan konstruksi asing yang beroperasi di negara berkembang melalui moda 3 akan membawa dampak positif bagi perekonomian tersebut. Secara umum, kehadiran perusahaan asing disambut dengan harapan bahwa mereka akan memberikan dorongan kuat untuk pertumbuhan industri lokal. Akan tetapi beberapa kajian memberikan hasil yang beragam, misalnya sebuah studi oleh Corkin (2012) tentang industri konstruksi Angola, mengungkapkan bahwa selain memainkan peran terbatas dalam pengembangan kapasitas perusahaan lokal, masuknya perusahaan konstruksi asing di negara tersebut memiliki implikasi yang merugikan bagi posisi fiskal negara dengan meningkatkan tingkat utang. Hasan dkk (2018) juga menemukan dalam studi mereka bahwa berbagai masalah mengimbangi manfaat dari masuknya perusahaan konstruksi asing seperti tingkat pengawasan yang buruk, kekurangan tenaga kerja terampil, masalah dalam perolehan bahan bangunan dan peralatan konstruksi, serta desain yang tidak memadai. Di Malaysia, kajian yang dilakukan Federal Bank of Malaysia tahun 2017 mengungkapkan pada tahun-tahun awal partisipasi perusahaan konstruksi asing di negara tersebut dianggap sebagai game-changer untuk pembangunan ekonomi Malaysia. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, ada bukti bahwa manfaat yang diperoleh dari kehadiran perusahaan asing telah mengecil (Veerasanai & Alias, 2020).

Pasokan (*supply*) jasa konstruksi secara internasional melibatkan pergerakan pekerja dan profesional yang tidak terampil, semi terampil dan terampil untuk melakukan berbagai pekerjaan, termasuk melakukan desain, manajemen, dan konstruksi fisik. Namun demikian, perlunya keterampilan khusus dan pengetahuan teknis, yang mungkin tidak tersedia secara lokal dan fokus jasa ini yang berorientasi pada klien memunculkan sejumlah hambatan dalam moda 4 atau *movement of natural persons*. Beberapa hambatan tersebut diantaranya yaitu kurangnya pengakuan kualifikasi pekerja yang memenuhi syarat secara profesional, serta persyaratan kewarganegaraan atau tempat tinggal. Selain itu juga terdapat hambatan seperti tes bagi tenaga kerja asing, persyaratan pelatihan untuk staf lokal, dan sejenisnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pembangunan infrastruktur menjadi andalan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Terlebih lagi di masa pemulihan ekonomi pasca Pandemi covid-19 seperti saat ini, dimana berbagai sektor terkena imbasnya. Pembangunan Infrastruktur harus terus berjalan karena menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Saat ini, pemerintah berfokus pada meningkatkan investasi, baik investasi publik maupun swasta, guna menaikkan ekspansi ekonomi Indonesia. Khususnya investasi di bidang infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas di seluruh pelosok negeri.

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, penyederhanaan skema dan pengaturan jasa konstruksi agar tidak membebani masyarakat, serta menjamin arah kebijakan jasa konstruksi yang baik dan mengedepankan profesionalisme. Dengan adanya sektor jasa konstruksi yang berkualitas dan kuat secara otomatis akan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah seiring meningkatnya jumlah perjanjian perdagangan jasa di sektor konstruksi adalah perlunya mensinergikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan ketentuan yang sudah dikomitmenkan Indonesia dengan negara mitra di berbagai perundingan internasional. Harmonisasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha di sektor jasa konstruksi Indonesia sehingga dapat meningkatkan ekspor konstruksi Indonesia.

Asosiasi juga dapat membentuk Lembaga Sertifikasi, setelah mendapatkan akreditasi dari Pemerintah. Hal ini diharapkan dapat mendorong seluruh asosiasi profesi, badan usaha dan rantai pasok untuk lebih profesional dalam mengembangkan klasifikasi usaha/profesinya serta menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan untuk anggotanya agar dapat memasuki pasar global dan bersaing dengan tenaga kerja asing dari negara lain.

Kurangnya ketersediaan data sektor jasa dan informasi yang lengkap dan terpercaya merupakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Data ini sangat dibutuhkan dalam meliberalisasi perdagangan jasa di fora bilateral, regional dan multilateral. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem arsitektur industri jasa nasional sehingga data gambaran riil dari industri jasa dalam negeri dapat disediakan secara memadai.

Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dan Kementerian Perdagangan perlu berkolaborasi lebih erat lagi bersama K/L terkait untuk mempersiapkan pengusaha jasa konstruksi nasional agar mampu bersaing dengan BUJK dari luar negeri seiring meningkatnya komitmen Indonesia di dalam perjanjian perdagangan jasa di sektor konstruksi. Kolaborasi ini tidak hanya untuk mempersiapkan material, tetapi juga SDM,



BUJK nasional, dan peralatannya demi terciptanya industri jasa konstruksi nasional yang berdaya saing.

## REFERENSI

- Bon, R., & Crosthwaite, D. (2000). The Future of International Construction. *American Society of Civil Engineers*.
- BPS. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020). *Konstruksi dalam angka 2020*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020b). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*. Jakarta: BPS.
- Butkeviciene, J. (2005). *Managing Request-Offer Negotiations Under GATS: The Case of Construction and Related Engineering Services*. Geneva, Switzerland: UNCTAD.
- Chen, C. (2008). Entry mode selection for international construction markets: the influence of host country related factors. *Construction Management and Economics vol.26 no.3* , 303-314.
- Corkin, L. (2012). Chinese construction companies in Angola: A local linkages perspective. *Resour. Policy. vol. 37 no.4*, 475–483.
- Cuervo, J., & Low, S. (2003). Ownership advantages/disadvantages of Singapore transnational construction corporations. *Construction Management and Economics, 21*, 80–94.
- Grosso, M. G., Jankowska, A., & Gonzales, F. (2008). Trade And Regulation: The Case Of Construction Services. *OECD Experts Meeting on Construction Services*.
- Hasan, A., Baroudi, B., Elmualim, A., & Rameezdeen, R. (2018). Factors affecting construction productivity: A 30 year systematic review. *Eng, Const Arch Man.*, 916–937.
- Jennings, P., & Holt, G. (1998). Pre-qualification and multi-criteria selection: a measure of contractors' opinions. *Construction Management and Economics, 16*, 651–60.
- Job, D., Hans, V., & Geert-Jan, J. (2002). Market strategies and core capabilities in the building industry. *Construction Management and Economics, vol.20, no.10*, 109–118.
- Kementerian PUPR. (2020). *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020*. Jakarta: Kementerian PUPR.

- Ling, F. (2005). Benefits that foreigner AEC firms derive when undertaking construction projects in China. *Management Decisions*, Vol.43 No.4, 501-515.
- Ling, F. Y., & Kwok, D. H. (2007). Enablers for Singapore contractors to internationalize construction services. *Construction Management and Economics*, vol.25 no.3, 267-275, DOI: 10.1080/01446190600781834.
- Manning, C., & Aswicahyono, H. (n.d). *Perdagangan dan Pekerjaan di Sektor Jasa di Indonesia*. Retrieved from [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_185239.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_185239.pdf)
- Mukherjee, A. (2001). Trade In Construction And Consultancy Services: India And The Gats. *Working Paper No. 75 Indian Council For Research On International Economic Relations*.
- pu.go.id. (2018, Agustus 30 ). *Ekspor Jasa Konstruksi Indonesia Terus Didorong*. Retrieved from <https://pu.go.id/berita/ekspor-jasa-konstruksi-indonesia-terus-didorong>
- pu.go.id. (2018, Oktober 3). *Kementerian PUPR Dorong Kontraktor Indonesia Ekspor Jasa Konstruksi*. Retrieved from <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-dorong-kontraktor-indonesia-ekspor-jasa-konstruksi>
- Statista Research Department. (2021, Oktober 4). *Foreign direct investment in construction in Indonesia 2013-2020*. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/680349/foreign-direct-investment-construction-indonesia/>
- Statista Research Department. (2021, Oktober 4). *Indonesia GDP Contribution by Industry*. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/1019099/indonesia-gdp-contribution-by-industry/>
- Veerasanai, R., & Alias, A. (2020). A review of foreign construction firm presence in the Malaysian construction industry. *International Journal of Construction Management*, DOI: 10.1080/15623599.2020.1742635.
- wits.worldbank.org. (2021). *Indonesia Service exports, in BoP, current US\$ 2015-2019*. Retrieved from <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/StartYear/2015/EndYear/2019/Indicator/BX-GSR-NFSV-CD#>
- wits.worldbank.org. (2021). *Indonesia Service imports, in BoP, current US\$ 2015-2019*. Retrieved from <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/StartYear/2015/EndYear/2019/Indicator/BM-GSR-NFSV-CD#>

World Trade Organization. (2019). *World Trade Report 2019: The future of services trade.* .  
Switzerland: WTO.